



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HAERANAH**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**
3. NHK : **869674**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.225.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 465 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/54 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 960.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 223.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 232.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 449.247.309**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.129.247.309**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.129.247.309

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.